

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik seperti pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber utama legitimasinya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. *good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi, nepotisme.

Salah satu prinsip *good governance* yang penting adalah akuntabilitas publik, seiring dengan ini, fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini juga adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009:20).

Akuntabilitas publik memiliki lima dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas *financial* (Mahmudi, 2016). Akuntabilitas keuangan menjadi hal penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Sasaran utamanya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari kualitas penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja *financial* pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan harus mempunyai kualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2010, yaitu: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dapat juga dilihat dari opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) selaku badan yang memeriksa dan menilai LKPD. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas.

Hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD tahun 2016, mengungkapkan opini WTP atas 375 (70%), opini WDP atas 139 (26%), dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) 23 (4%). Capaian opini secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, BPK 2017. Meskipun secara keseluruhan dari 537 LKPD mengalami peningkatan, tetapi untuk kota Pangkalpinang belum mengalami perubahan capaian. Hal dapat dilihat dari tabel opini BPK dibawah ini:

Tabel I.1 Daftar Opini LKPD Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Prov. Bangka Belitung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Kab. Bangka	WTP DPP	WTP DPP	WDP	WDP	WTP
3	Kab. Bangka Barat	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WDP	WTP
4	Kab. Bangka Selatan	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
5	Kab. Bangka Tengah	WTP DPP	WTP DPP	WDP	WDP	WTP
6	Kab. Belitung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	Kab. Belitung Timur	WDP	WDP	TW	WDP	WDP
8	Kota Pangkalpinang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

(Sumber : BPK IHP Semester II Tahun 2017)

Dari tabel I.I dapat dilihat bahwa Kota Pangkalpinang selama tahun 2012-2016 masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini wajar dengan pengecualian yang diberikan BPK atas laporan keuangan yang cukup baik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, namun ada hal-hal

tertentu yang tidak dapat diterima tetapi tidak sampai merusak kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan .

Seperti data sekunder yang peneliti dapatkan bahwa permasalahan yang menyebabkan Kota Pangkalpinang masih mendapatkan opini WDP tahun 2016 dalam LKPD, dimana untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri masih bermasalah dengan akun belanja modal. Kelebihan pembayaran kepada rekan atas kekurangan volume fisik atau pemahalan harga pekerjaan yang belum seluruhnya dipulihkan pada belanja modal gedung dan bangunan dan jalan, irigasi, dan jaringan terjadi di 38 pemda, salah satunya Pemkot Pangkalpinang. (www.bpk.go.id)

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan setiap satu periode oleh BPK untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, berdasarkan pada (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan oleh Sande, (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Suratmi, dkk (2014) penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Namun penelitian yang dilakukan Sari, (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Bukan hanya penyajian laporan keuangan saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi terciptanya akuntabilitas keuangan daerah, peran SPIP sangat penting untuk menerapkan dan melaksanakan *good governance*. Jika pengendalian intern lemah, maka kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya, informasi tidak dipercaya kebenarannya, serta tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan *good governance* (Mahmudi, 2016). Sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses integral pada suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Dalam undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perpindahan negara pasal 28 Ayat 1 dinyatakan bahwa dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah pedoman yang menjadi tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Akuntabilitas dapat dikatakan efektif apabila informasi terkait dalam laporan keuangan dapat mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada publik berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. (Fauziah, 2017). Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah dapat melalui surat kabar, internet, atau cara

lain nampaknya belum menjadi hal yang umum (Shande, 2013). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan untuk evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas memiliki keterkaitan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pemerintah daerah, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan judul **“Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Di Kota Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah ?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah?

4. Apakah kualitas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan aksesibilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang akan dirumuskan dan diuji adalah variabel kualitas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di kota Pangkalpinang.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di kota Pangkalpinang.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah di kota Pangkalpinang.
4. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan aksesibilitas

laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Pangkalpinang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Mengimplementasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan maupun teori dalam penerapannya dengan masalah yang diteliti.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi terkait, seperti pemerintah Kabupaten Kota Pangkalpinang dalam mengatasi akuntabilitas keuangan daerah yang belum baik. Masalah pada tersebut dapat diperbaiki dengan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern, aksesibilitas sehingga akuntabilitas keuangan Daerah Kota Pangkalpinang akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

3. Secara kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara runtut dan jelas, sehingga tulisan dapat lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Isi dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian-uraian teori kualitas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, aksesibilitas dan pendapat para pakar maupun hasil penelitian sebelumnya, model penelitian, serta pengembangan hipotesa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang di gunakan, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, tingkat pengembalian kuisioner yang telah terkumpul, deskripsi responden, hasil uji kualitas data, hasil uji klasik, hasil uji hipotesis, dan setelah itu pembahasan dari analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian dan menjelaskan keterbatasan pada penelitian yang dilakukan penulis serta memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

